Refleksi Kegiatan Pendampingan Pasca Konstruksi BLH Kab. Sleman - Aksansi

Pendampingan pasca konstruksi merupakan kegiatan bersama antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman dengan AKSANSI. Program yang direncanakan di awal tahun 2016 ini bertujuan untuk mendampingi KSM/KPP Pengelola IPAL dalam kegiatan operasional dan perawatan IPAL. Kegiatan pendampingan yang dilakukan berbentuk sosialisasi terkait kegiatan operasional dan perawatan IPAL. Kegiatan pendampingan sebagai awalan dilakukan untuk 49 KSM/KPP di Kabupaten Sleman. Lokasi dan waktu pertemuan ditentukan sendiri oleh pengurus KSM/KPP dan pengguna. Hingga November 2016 hasil kegiatan yang sudah terlaksana ada di 46 lokasi KSM Pengelola/KPP, dan untuk 3 lokasi akan direncanakan untuk tahun 2017 bersama dengan KSM/KPP yang lain.

Kegiatan yang sudah selesai pada bulan November 2016 ini tak lepas dari beberapa kendala misalnya dalam penentuan waktu pertemuan di masyarakat pengguna sendiri. Kebanyakan kegiatan dilakukan pada malam hari dengan persentase pengguna yang hadir didominasi oleh laki-laki. Persentase pengguna yang hadir dalam kegiatan sosialisasi berkisar antara 25% hingga 90% dari jumlah KK pengguna karena biasanya yang hadir hanya perwakilan dari-masing masing rumah tangga.

Dari kegiatan ini ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan sarana sanitasi IPAL Komunal yang ada di Kab. Sleman baik secara teknis dan sosial kelembagaan. Jika dipersentase ada 74% KSM Pengelola/KPP yang memiliki permasalahan teknis pada sarana IPAL Komunal, 20% memiliki permasalahan teknis dan sosial sedangkan 6% sisanya berjalan baik dilihat dari segi teknis dan sosial kelembagaan. Manfaat dari pendampingan yang dapat diambil oleh KSM/KPP maupun dari Tim AKSANSI antara lain: dari sisi KSM/KPP dan pengguna, beberapa KSM/KPP menjadi lebih mengerti terkait teknis kegiatan perawatan yang harus dilaksanakan baik oleh operator dan pengurus KSM/KPP. Sedangkan dari Tim AKSANSI, kegiatan ini menunjukkan tentang keadaan riil yang terjadi di KSM/KPP terkait tentang teknis, sosial, dan kelembagaan sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing lokasi.

Harapan kedepan, kegiatan pendampingan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Masalah penentuan waktu dapat dijadwalkan pada awal tahun, sehingga undangan dari BLH dapat disesuaikan.

Progress dan Kendala pelaksanaan Co Management di 8 Kota/Kabupaten

Proses kerjasama dalam pengelolaan Sarana sanitasi antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Swadaya Masyarakat pengelola dan pemanfaat IPAL sangat penting dalam terciptanya sanitasi berkelanjutan. Salah satu cara yang sangat efektif untuk keberlanjutan pengelolaan IPAL komunal adalah adanya kerjasama antara Sekretariat AKSANSI dengan Pemerintah Daerah melalui pembentukan AKSANSI Daerah. AKSANSI Daerah ini antinya menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menghubungkan da melaksanakan kegiatan pendampingan, pengawasan dan penanganan permasalahan. AKSANSI Daerah juga perlu dibentuk untuk membantu terwujudnnya pengelolaan sarana sanitasi berkelanjutan secara langsung oleh dan bagi masyarakat disuatu daerah. Proses kerjasama ini diawali dengan adanya Audiensi kepada Pemerintah Daerah terkait perlunya dibentuk AKSANSI pada suatu daerah.

Sebagai wadah dan Asosiasi KSM Sanitasi seluruh Indonesia, Sekretariat AKSANSI menjadi mediator dalam menghubungkan KSM pengelola IPAL yang ada disuatu daerah. Sekretariat AKSANSI melakukan pengumpulan data kelembagaan, teknis dan keuangan KSM pengelola IPAL dengan bantuan langsung dari KSM yang ada disuatu daerah untuk mencari data yang valid dan efektif. Data yang dimiliki AKSANSI dapat menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah dalam menilai keberhasilan, menemukan dan menangani permasalahan sanitasi khususnya dalam keberlanjutan sarana IPAL komunal dan MCK Plus dengan segera.

Jika Pemerintah Daerah mempunyai keinginan untuk menjangkau KSM pengelola IPAL yang ada di daerahnya, maka akan diadakan Audiensi dan jika diperlukan dapat segera dilakukan pembentukan AKSANSI Daerah tersebut. Sekretariat AKSANSI juga akan mengadakan perikatan dengan suatu daerah melalui MoU. Sebagai bentuk kerjasama khusus, Sekretariat AKSANSI akan mengupayakan adanya Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) yang berisikan kesepakatan teknis dan pelaksanaan kegiatan secara detail hingga pada masalah penganggaran. Dari 8 MoU (Kota Pekalongan, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Temanggung, kota Mojokerto, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kota Kediri dan Lubuk Linggau) hingga saat ini belum ada yang dapat mewujudkan Moa. Kendala yang muncul setelah proses Memorandum of Understanding (MoU) menuju Perjanjian Kerjasama (MoA) antara lain:

- Tidak ada tanggapan terhadap draft Perjanjian Kerjasama yang telah diserahkan kepada pihak terkait
- Pergantian / Mutasi jabatan dari pengampu program sanitasi SKPD (baik personal maupun perubahan struktur dalam SKPD).
- Tidak ada tanggapan terhadap usulan dana yang direncanakan dalam program co management.
- Tidak ada dana yang dianggarkan khusus untuk sanitasi pada beberapa SKPD (sanitasi masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan).
- Adanya aturan terkait dana hibah dan bantuan sosial dalam PP No. 2 tahun 2012 Permendagri No. 14 tahun 2016.
- SKPD memiliki perencanaan tersendiri untuk kegiatan sanitasi sehingga tidak mengadakan perikatan dengan Sekretariat AKSANSI.
- Adanya LKM/BKM dan Lembaga desa lain yang mengampu program sanitasi, yang mengakibatkan AKSANSI tidak mendapat peran dalam suatu kegiatan di daerah (terutama berkaitan dengan pendanaan).

Hingga saat ini, hanya Pemerintah Daerah Mojokerto yang sudah melanjutkan dalam tahap perumusan mekanisme teknis pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam Retrofitting MCK Plus menjadi MCK plus SR.

BULETIN AKSANSI

Untuk Sanitasi yang Berkelanjutan

- Refleksi Kegiatan Pendampingan Pasca Konstruksi BLH Sleman - Aksansi
- Pertemuan Regional Aksansi Daerah
- Sarasehan KSM/KPP Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2016 Jilid 2
- Pembentukan Aksansi Daerah Kabupaten Bogor
- Pelatihan Pengukuran dan Penyedotan Lumpur Tinja

BULETINAKSANSI
Untuk Sanitasi yang Berkelanjutan

Dicetak dan dipublikasikan oleh:

Sekretariat AKSANSI Pusat

Gg. Pandega Mandala No. 34 C, Manggung, Jl. Kaliurang KM 5,2, Sleman, D. I. Yogyakarta, 55281

Jika anda mempunyai berita, saran atau kritik yang ingin ditampilkan di dalam buletin dan website Aksansi, dapat dikirimkan melalui email

(0274) 515774 (0274) 565461 089627878373 aksansi@aksansi.org www.aksansi.org

Edisi 1

2017

Pertemuan KSM/KPP & Pembagian Hadiah Sanitasi Award Kab. Sleman 2016

Di era yang semakin berkembang dan modern saat ini IPAL Komunal adalah sebuah solusi untuk menjaga sumber air bersih dan mengurangi pencemaran air tanah dari bakteri ecoli pada sumur. Dahulu sebelum adanya pengolahan air limbah skala komunal pembuatan septicktank harus memiliki jarak minimal 10 meter dari sumur, namun saat ini semakin banyaknya rumah dan semakin sedikitnya luasan tanah maka hal tersebut sudah tidak mungkin dipenuhi. Contoh yang nyata adalah diwilayah yang padat penduduk perkotaan dengan luasan tanah yang sangat minim kadang masyarakat mengabaikan hal untuk pengolahan limbah rumah tangga (mandi,cuci, dan kakus).

Sleman adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah menjalankan program tersebut. Untuk saat ini Kabupaten Sleman telah memiliki 112 sarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat dari berbagai program (SLBM-DAK, SANIMAS, dan USRI).

Pada Sabtu, 27 Agustus 2016 Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan AKSANSI melaksanakan pertemuan jejaring IPAL se Kabupaten Sleman. Kegiatan ini dihadiri oleh 63 perwakilan dari KSM Pengelola/KPP yang tersebar di Kabupaten Sleman. Kegiatan ini dikhususkan bagi KSM Pengelola/KPP yang memiliki permasalahan teknis dan sosial.

Pada kesempatan ini pula Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman mengumumkan pemenang hasil Kegiatan Sanitasi Award 2016 yang diikuti oleh 98 KSM Pengelola/KPP yang ada di Kabupaten Sleman. Kegiatan penilaian dilaksanakan pada 23-27 Mei 2016. Penilaian sanitasi award tahun 2016 mencakup 3aspek utama, yaitu aspek teknis, aspek kelembagaan, dan aspek keuangan. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh 6 nominator pemenang yang diputuskan melalui Surat Keputusan Bupati Sleman, No. 27.6/Kep. KDH/A/2016 yaitu sebagai berikut :

a. Juara I KSM Pengelola/KPP "Bakti Warga" Padukuhan Mulungan Kulon, Desa Sendangadi, Kec. Mlati, mendapatkan Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 7.000.000.

b. Juara II KSM Pengelola/KPP "Tangkilan" Padukuhan Tangkilan, Desa Sidoarum, Kec. Godean, mendapatkan Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 6.000.000,-.

c. Juara III KSM Pengelola/KPP "Candi Indah" Padukuhan Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, mendapatkan Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,-.

d. Juara Harapan I KSM Pengelola/KPP "Sido Lancar" Padukuhan Jetis, Desa Caturharjo, Kec. Sleman, mendapatkan Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,-.

e. Juara Harapan II KSM Pengelola/KPP "Ngudi Sehat" Padukuhan Ngabean Kulon, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, mendapatkan Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,-.

f. Juara Harapan II KSM Pengelola/KPP "Ngudi Waras" Padukuhan Gedongan Lor, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, mendapatkan Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-.

Pertemuan Regional Aksansi Daerah

Sekretariat AKSANSI Pusat menyelenggarakan pertemuan regional Aksansi Daerah yang kedua kalinya tahun ini. Pertemuan ini diadakan pada tanggal 27-29 Oktober 2016 di Yogyakarta. Peserta pertemuan kali ini adalah 19 Aksansi Kota/Kabupaten yang ada di pulau Jawa dan 3 Aksansi Provinsi di Bali, DIY dan Jawa Tengah, serta 5 orang anggota Pokja AKSANSI.

Pertemuan regional Aksansi merupakan forum untuk melaporkan perkembangan kegiatan yang berjalan pada masing-masing Aksansi Daerah. Pertemuan ini menjadi ajang tukar pikiran sehingga masing-masing aksansi daerah dapat mensinergikan kegiatan dengan Sekretariat Aksansi Pusat. Kegiatan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam pengelolaan kegiatan bersama dalam Sanitasi berbasis masyarakat karena antara Aksansi Daerah satu dan yang lain dapat saling memberikan saran, masukan bahkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pada Pertemuan Aksansi ini juga memberikan usulan-usulan kegiatan yang dapat dijadikan opsi layanan unggulan Aksansi daerah dalam berkegiatan. Menu ini nantinya diharapkan dapat mendorong proses kerjasama dengan pemerintah daerah yang akhirnya menjadikan program yang dapat dianggarkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sekretariat Aksansi Pusat akan menuntun dalam melakukan Visioning supaya masing-masing Aksansi daerah dapat mempunyai model pendekatan yang berbasis kebutuhan. Hasil dari visioning ini nantinya menjadi bekal dalam merencanakan dan melakukan kegiatan bersama KSM/KPP ataupun Pemerintah daerah. Pertemuan ini juga akan mengumpulkan best practices yang paling memungkinkan untuk direplikasi pada Aksansi daerah yang lain. Secara khusus akan diberikan waktu terkait penyelesaian permasalahan khusus yang ada pada beberapa Aksansi daerah.

Pertemuan kali ini membahas topik-topik sebagai berikut:

1. Capaian Program 2016
2. Perencanaan 2017
3. Penggunaan Gameboard untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi (Pengurasan, Pendampingan Paska Konstruksi, Rehabilitasi Fasilitas, dan Retrofitting)
4. Penyusunan praktek terbaik kegiatan operasional dan pemeliharaan sanitasi berbasis masyarakat
5. Peran pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sarana sanitasi yang disampaikan oleh Ibu Restuti dari UPTD PAL Kab. Sleman dan Ibu Dyah Sulistyowati dari Bappeda Kab. Temanggung.
6. Konsultasi bilateral mengenai permasalahan spesifik yang dihadapi oleh beberapa Aksansi Daerah.
7. Studi Banding ke IPAL Mendiro, Kab. Sleman

Melalui pertemuan regional ini, diharapkan Aksansi Daerah di seluruh Indonesia dapat semakin maju dalam berkegiatan pada bidang Sanitasi.

TEMUAN DAN REKOMENDASI PRE-MONITORING UNTUK 11 KOTA/KABUPATEN

Salah satu manfaat yang diperoleh dari keberadaan AKSANSI Daerah di beberapa Kota/Kabupaten adalah mendapatkan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap operasional fasilitas sanitasi sehingga menjamin keberlanjutan sarana yang dibangun. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh AKSANSI adalah kegiatan pre-monitoring dimana tim pre-monitoring akan mengunjungi dan bertemu dengan pengurus/pengelola KSM/KPP untuk mengetahui kondisi sarana sanitasi berbasis masyarakat yang telah dibangun. Hasil dari pre-monitoring kemudian disampaikan ke pemerintah daerah dan KSM/KPP untuk dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan melaui beberapa skema, seperti audiensi ke pemerintah daerah, pertemuan KSM/KPP, maupun melalui surat ke sekretaris daerah atau dinas terkait. Pada tahun 2016, hasil pre-monitoring yang berisi temuan dan beberapa rekomendasi telah disampaikan ke 11 kota/kabupaten, yaitu Kota Mojokerto, Kota Surakarta, Kab. Temanggung, Kota Pekalongan, Kota Bogor, Kab. Kulonprogo, Kab. Blitar, Kota Kediri, Kab. Serang, Kab. Magelang, dan Kota Batu.

FOKUS pada Kondisi Teknis, Kelembagaan, dan Keuangan

Kondisi Teknis

Sumber: Hasil Premonitoring Kota Bogor 2016

Melihat kondisi aliran limbah yang masuk dan keluar IPAL menjadi salah satu indicator apakah IPAL berfungsi atau tidak. Status pengurasan perlu juga diketahui agar IPAL dapat bekerja secara optimal. Karena jika lumpur sudah tinggi dapat mengurangi kapasitas limbah yang masuk dan mengurangi kinerja IPAL. Sebagian besar lokasi belum pernah dilakukan pengurasan.

Kondisi Kelembagaan

Jumlah pengguna yang menggunakan fasilitas MCK maupun jumlah sambungan rumah yang tersambung ke IPAL menjadi perhatian khusus bagi AKSANSI untuk melihat seberapa besar cakupan dari program sanitasi berbasis masyarakat. Selain itu, jumlah pengguna juga mempengaruhi kinerja pengolahan di dalam IPAL.

Keberadaan operator merupakan salah satu factor keberhasilan dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Operator bertugas untuk melakukan kegiatan pemeliharaan sambungan utama dan IPAL serta bangunan MCK. Tentunya operator perlu diberi penghargaan dalam menjalankan tugasnya seperti dengan pemberian gaji. Dalam menjalankan tugasnya tentunya operator dan pengurus perlu diberikan pelatihan operasional dan perawatan secara rutin.

Sumber: Hasil Premonitoring Kota Bogor 2016

Kondisi Keuangan

Keberlanjutan dari sarana sanitasi yang berbasis masyarakat sangat berhubungan dengan kemauan dan kemampuan pengguna untuk melakukan iuran bulanan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan perawatan rutin.

Melibatkan pemerintah daerah dalam Kegiatan Paska Konstruksi Sanitasi Berbasis Masyarakat

Pada penghujung tahun 2016, Sekretariat AKSANSI bersama dengan AKSANSI Daerah Kota Bogor telah menyampaikan rekomendasi dari temuan premonitoring yang dilaksanakan pada tahun 2015 kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor dengan tembusan kepada Kepala Bappeda Kota Bogor, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Bogor, Kepala Dinas Wasbangkim Kota Bogor, Kepala BLHD Kota Bogor, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, serta Kepala UPTD PAL Kota Bogor. Surat rekomendasi ini dapat muncul tentunya melalui proses yang panjang. Diawali dengan pelaksanaan premonitoring pada 52 lokasi di Kota Bogor, kegiatan manajemen dan analisis data, dan kemudian penyampaian hasil serta audiensi. Dari rekomendasi yang diberikan, terdapat 6 KSM yang dijadikan prioritas untuk kegiatan pendampingan pasca konstruksi.

Prioritas monitoring dan pendampingan paska konstruksi KSM/KPP nantinya akan dilakukan pada KSM/KPP yang memiliki permasalahan besar dan akan dijadikan sebagai Pilot Project agar dapat menjadi role model scaling up program paska konstruksi yang mensinergikan semua stakeholder Sanitasi Berbasis Masyarakat mencapai Universal Access 100-0-100. Harapannya, dengan penyampaian hasil pre-monitoring ini dapat menarik minat pemerintah daerah untuk memiliki MoU dan perjanjian kerjasama Co-Management dengan AKSANSI untuk menjamin keberlanjutan dari KSM/KPP sanitasi berbasis masyarakat. (IM)

Edisi 1 2017

Pembentukan Aksansi Daerah Kabupaten Bogor

Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pengampu Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat sarana sanitasi kabupaten bogor memiliki inisiatif untuk melibatkan Sekretariat Aksansi dalam acara Pembentukan Aksansi Kabupaten Bogor. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Penyerahan Penghargaan sanitasi sekaligus Pelatihan bagi Badan Pengelola Air Bersih (BPS-AB) dan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) Sanitasi serta sosialisasi PETERPAM (Penyedotan Tinja Terjadwal dan Air Minum) kabupaten Bogor.

Selain meningkatkan kapasitas Badan Pengelola Air Bersih (BPS-AB) dan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP). Pertemuan ini juga mengakomodir pengajuan dan pendaftaran untuk sambungan air bersih baru, sarana septic tank individual, penambahan sambungan rumah IPAL dan juga IPAL komunal baru melalui desk dengan petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pertemuan ini bertujuan supaya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan air bersih maupun air limbah dapat terakomodir.

Pada hari kedua, Rabu tanggal 28-09-2016 bertempat di Villa Cokro 3, Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, juga dilaksanakan pertemuan pembentukan forum AKSANSI kabupaten Bogor yang difasilitasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor dan Sekretariat AKSANSI Pusat. Pertemuan dengan mengundang 54 KSM/KPP/BPS-AB Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan acara Pembentukan Asosiasi KSM Sanitasi (AKSANSI) Daerah Kabupaten Bogor dan dihadiri oleh: Perwakilan KPP Kab. Bogor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, SEKRETARIAT AKSANSI Pusat, AKSANSI Daerah Kota Bogor dan Failitator Kab. Bogor.

Aksansi Pusat memberikan paparan terkait pentingnya Aksansi daerah di suatu Kota/kabupaten baik bagi KPP maupun Dinas terkait. Aksansi Kota Bogor juga memaparkan apa saja kegiatannyang dilakukan oleh Aksansi yang sangat penting dan berguna bagi keberlanjutan sarana sanitasi bernasis masyarakat. Setelah paparan dan sesi tanya jawab, muncul ketertarikan luar biasa dari pengurus KPP se kabupaten Bogor untuk membentuk suatu forum/ wadah komunikasi dalam kepengurusan AKSANSI Kabupaten Bogor.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh ± 35 orang perwakilan KPP se kabupaten Bogor tersebut dihasilkan kesepakatan Pembentukan AKSANSI DAERAH KABUPATEN BOGOR dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir sebagai berikut:

Pelindung	: Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor
Pembina	: Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bogor
Penasehat	: AKSANSI Provinsi Jawa Barat
Ketua	: Kusnadi (KPP Ganda Lestari)
Sekretaris	: Hilman Alamsyah (KPP Hambaro Bersek)
Bendahara	: Jarkasih (KPP Tirta Makmur)

Edi Kusnaedi
Ketua AKSANSI Kab. Bogor

Pelatihan Pengukuran dan Penyedotan Lumpur Tinja

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Sekretariat AKSANSI Pusat menyelenggarakan pelatihan Pengukuran dan Penyedotan Lumpur Tinja untuk IPAL sanitasi berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman.

Pelatihan ini diperuntukkan bagi para KSM/KPP pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman yang berjumlah 98 KSM/KPP. Latar belakang dari pelatihan ini adalah masih kurangnya pengetahuan KSM/KPP tentang cara pengukuran dan kapan harus melakukan pengurasan IPAL. Meskipun kapasitas IPAL besar, namun ada saatnya ketika IPAL harus dikuras. Pengurasan lumpur tinja yang ada di dalam IPAL harus dilakukan agar kinerja sistem dalam menguraikan polutan tetap optimal.

Salah satu tanda IPAL harus dikuras adalah ketika ketinggian lumpur di dalam bak sudah melebihi 50 cm. Dalam ketinggian tersebut, banyak lumpur yang sudah tidak aktif lagi yang mengendap di dasar bak. Lumpur yang sudah tidak aktif ini berwarna hitam dan jika tidak dikeluarkan justru akan mengurangi volume air limbah yang bisa diolah. Pengurasan yang baik adalah mengeluarkan lumpur yang berwarna hitam yang berada di dasar bak IPAL dengan menyisakan lumpur yang masih aktif yang berada di atasnya kira-kira setinggi 30 cm. Oleh karena itu, pengurasan tidak boleh menghabiskan semua lumpur yang ada karena hal ini akan membuat IPAL kekurangan bakteri yang dapat menguraikan polutan sehingga sistem akan mulai dari nol seperti ketika pertama kali digunakan. Lumpur aktif diperlukan agar sistem dapat bekerja seperti semula setelah IPAL dikuras.

Pelatihan ini dilakukan sebanyak dua kali di dua tempat yang berbeda agar lebih efektif mengingat jumlah KSM/KPP yang hampir 100 KSM/KPP. Pelatihan pertama dilakukan di KSM Layur Sehat, Minomartani, pada tanggal 25 Oktober 2016, dan yang kedua dilakukan di KSM Andum Roso, Santan pada tanggal 5 November 2016. Tiap pelatihan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama adalah penyampaian teori tentang pengukuran dan proses pengurasan yang benar, dilanjutkan dengan penyampaian pengalaman dari KSM Layur Sehat dan KSM Andum Roso, dilanjutkan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Kab. Sleman. Setelah itu, dilakukan praktek pengukuran dan pengurasan lumpur tinja dengan menggunakan truk sedot tinja sehingga peserta mengetahui tidak hanya secara teori, tapi juga secara praktek.

Diharapkan dengan adanya pelatihan pengukuran dan pengurasan ini, para pengelola IPAL sanitasi berbasis masyarakat dapat memahami cara mengukur lumpur dan melakukan persiapan pengurasan yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

ASOSIASI KSM SANITASI AKSANSI SELURUH INDONESIA
BULETIN AKSANSI

Menuju keberkelanjutan KSM SANIMAS, Mengetuk kesadaran semua pihak ....

Pemerintah Indonesia telah sukses membangun lebih dari 15,000 sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat atau yang dikenal luas dengan SANIMAS dan masih berkomitmen membangun lebih banyak lagi untuk mencapai Universal Access 2019 atau yang lebih populer dengan istilah 100-0-100. Namun untuk mencapai keberlanjutan Operasional dan Perawatan dalam jangka panjang, KSM membutuhkan dukungan. AKSANSI telah mengisi gap dengan menjadi mediator dan penggagas Co-Management KSM dan Pemerintah daerah di 8 - 9 Kota/Kabupaten dari 30 AKSANSI Daerah yang telah dibentuk. Dan sejak 4 tahun pelaksanaan riset keberlanjutan SANIMAS, AKSANSI mulai menapaki jalan panjang menuju pengakuan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia dalam forum-forum nasional.

Dalam monitoring reguler yang dilakukan oleh AKSANSI daerah dan Sekr. AKSANSI, ditemukan permasalahan pengelolaan Sanimas yang sulit dilakukan sendiri oleh KSM/KPP/BPS , yaitu :

1. Perbaikan besar dan rehabilitasi
2. Sarana yang berkurang penggunanya
3. Penyedotan Lumpur tinja
4. Penarikan Iuran Pengguna
5. Edukasi berkelanjutan tentang manfaat dari Sanimas
6. Membayar Operator dan Pengelola
7. Menunjuk dan melegalkan tugas Operator dalam tatanan masyarakat

Keberlanjutan Sanimas membutuhkan dukungan Pemerintah daerah. Namun dibawah ini ada empat faktor yang menyulitkan Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlanjutan Sanimas, yaitu:

1. Peraturan dalam Keuangan Publik dan ketakutan atas sanksi jika salah penggunaan
2. Kepemilikan Aset untuk Sarana Sanimas yang telah dibangun
3. Norma terhadap "Pemberdayaan Masyarakat" (bahwa masyarakat bertanggungjawab sepenuhnya pengelolaan sarana Sanimas)
4. Informasi yang kurang dan disinsentif dari kelalaian pembinaan

Dalam Workshop Center for Regulation Policy and Governance (CRPG) Universitas Ibnu Khaldun yang diselenggarakan tanggal 25 Oktober 2016 lalu, tim Ahli memaparkan kesimpulan perlunya Dukungan Pendanaan dari Pemda karena Air Limbah disebut sebagai : 1. Layanan dasar (harus disediakan oleh Pemda), 2. Urusan Wajib (setiap daerah harus menjalankannya), 3. Urusan Konkuren (diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Namun jika Sanimas bukan ASET yang dimiliki Pemda maka Pemda tidak boleh mengalokasikan pendanaan untuk Belanja Operasional dan belanja Pemeliharaan. Maka Bagaimana Solusinya?

Untuk Jangka Pendek, apakah bisa menggunakan Akun belanja yang sudah ada tanpa merubah aturan?

No.	Jenis Belanja		Akun	Contoh Bentuk Dukungan
1	Belanja Langsung	Belanja Pegawai	Honorarium	Membayar honor pegawai KSM?
2		Belanja barang dan jasa	Bahan habis terpakai	Dukungan tidak langsung untuk operasional satuan kerja yang menunjang air limbah berbasis masyarakat. Misal: untuk mendanai kegiatan UPTD
3			Asuransi	
4			Pemeliharaan Kendaraan	
5			Perawatan Aset	
6			Belanja Sewa	
7			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Dukungan langsung berupa transfer inventori
8		Belanja Modal	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Dukungan tidak langsung berupa pembelian motor atau mobil untuk penyedotan limbah
9	Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	Honorarium PNS dan non PNS	Dukungan tidak langsung berupa gaji/honor bagi personel teknis yang dapat membantu KSM melakukan perbaikan dan monitoring
10		Belanja Subsidi		Dukungan langsung berupa subsidi operasi dan pemeliharaan/tariff KSM
11		Belanja HIbah	Hibah kepada lembaga/organisasi ~~Hibah kepada kelompok masyarakat~~	Hibah uang kepada KSM
12		~~Belanja Bantuan Sosial~~	~~Bansos kepada ormas~~ ~~Bansos kepada anggota masy~~	~~Bantuan kepada KSM~~

*Pemetaan Kode Mata Anggaran yang dapat digunakan. Sumber: Laporan Riset ADRAS CRPG

Permasalahan Solusi Jangka Pendek dalam penggunaan Belanja Langsung

Dalam Akun Honorarium, masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apakah hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang merawat aset Pemda/Pusat?
2. Apakah perlu pengangkatan khusus sebagai honorer?
3. Dapatkah pengurus KSM diangkat sebagai honorer?

Demikian pula dalam hal Pemeliharaan aset, barang habis pakai, kendaraan: bisa dipakai untuk membeli kedoteng dan membiayai operasionalnya. Sejauh mana Tupoksi dan struktur Dinas/UPTD agar dapat maksimal diberi alokasi dana mencukupi untuk mendukung Air Limbah Skala Lokal?

Permasalahan Solusi Jangka Pendek dalam penggunaan Belanja Tidak Langsung

Dalam memberikan SUBSIDI kepada KSM, muncul pertanyaan mendasar mengenai :

1. Fungsi KSM memberikan layanan air limbah apakah termasuk ruang lingkup subsidi?
2. Status KSM sebagai perkumpulan BH (bukan BUMD) apakah mungkin diberi subsidi?
3. Apakah KSM mampu memberikan laporan keuangan dan diaudit?
4. Apakah struktur KSM terdesentralisir (banyak KSM dalam satu kota) feasible untuk di audit?

Sedangkan untuk memberikan HIBAH kepada KSM, permasalahan muncuk dalam hal :

1. Mayoritas KSM tidak berbadan hukum. Apa jadi masalah?
2. Bagaimana kalau KSM dibuat sentral (1 Kota/Kab = 1 KSM BH, membawahi puluhan site. Apa mungkin?
3. Apakah mungkin dianggarkan hibah secara umum untuk seluruh KSM dalam satu kota per tahun (tanpa ada proposal perbaikan/kerusakan)?

Sedangkan dalam skema BANSOS, pertimbangan yang menjadi pertanyaan adalah sampai sejauh manakan Bansos dapat dipergunakan?

Mencari celah dalam solusi Jangka Panjang

- Jika Sanimas menjadi Aset Pemda, apabila "dioperasikan" oleh masyarakat, apakah masyarakat perlu membiayai sendiri O/M nya? Vide Pasal 69-71 Permendagri 19/2016 tentang BMD.
- Belanja Hibah Reguler (penyimpangan aturan umum Hibah Lewat PP Air Limbah)?

Tentu tidak ada jawaban yang langsung bisa mengatasi semua masalah keberlanjutan, namun kita semestinya sepakat bahwa KSM butuh dukungan dan perlu diupayakan agar sedikit demi sedikit pembagian peran ini menjadi jelas mana yang KSM bisa kelola dan mana yang tidak.

Konsep Co-Management yang dipionirkan AKSANSI meletakkan peran masing-masing pihak pada tempatnya sesuai dengan tanggungjawab dan kapasitas yang dimiliki. AKSANSI membantu Pemerintah dalam pengelolaan dan menjamin keberlanjutan Sanimas, memaksimalkan investasi Sanimas, memberikan dukungan teknis, institusional dan keuangan serta memberikan rekomendasi terhadap perencanaan Sanimas kedepan dengan menggunakan rekomendasi Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan AKSANSI. Singkatnya, Co Management adalah titik kompromi pembagian peran yang adil bagi para penggiat Sanimas.

Beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia telah menjadi pionir yang memiliki komitmen kuat terhadap Keberlanjutan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Yang dilakukan adalah mengalokasikan anggaran baik dengan menggunakan DAK maupun APBD untuk:

1. Rehabilitasi Teknis
2. Perbaikan Besar pasca bencana
3. Sanitasi Award sebagai media monitoring dan penghargaan terhadap KSM dan Operator Sanimas
4. Dana Operasional tahunan (tidak lebih dari 2x berulang)
5. Pertemuan dan Studi Banding untuk memberi motivasi KSM.

Semoga skema ini berkembang sehingga semakin banyak Pemerintah Kota/Kabupaten yang mengaplikasikannya dan sekaligus bersinergi dengan AKSANSI untuk mencari solusi terbaik yang menjamin keberlanjutan Sanimas. (PP)

Edisi 1 2017

FORUM KSM/KPP SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2016

Mendukung Kemandirian KSM/KPP melalui Business Plan Development Jilid 2

Setelah berhasil melaksanakan kegiatan Forum KSM Sanimas yang dilaksanakan tanggal 27-29 Juli 2016 oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Yogyakarta, Sekretariat AKSANSI Pusat kembali mengikuti Sarasehan KSM yang dilaksanakan di Denpasar, Bali. Setelah mengundang 85 KSM/KPP di wilayah Indonesia barat, acara yang diselenggarakan di Hotel Mercure Bali Harvestland, Kuta dihadiri oleh 85 KSM/KPP yang berada di wilayah Indonesia Timur.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Agustus 2016 ini dibuka oleh Direktur Pengembangan PLP yang diwakili oleh Ir. Rudy Azrul Arifin, M.Sc. (Kasubdit PLP Khusus). Acara ini merupakan salah satu wujud dari kepedulian pemerintah terkait masalah sanitasi oleh dan untuk rakyat dalam memenuhi target 100-0-100.

Pada hari berikutnya, tanggal 16 Agustus 2016 diberikan motivasi sanitasi untuk para pengelola maupun satker dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat oleh Bapak Suwardi yang merupakan aktivis Sanitasi yang sudah 27 tahun aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pemaparannya, memang banyak tantangan yang dihadapi oleh pengurus KSM akan tetapi jika semua dilandasi dengan ibadah maka akan lebih ringan dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai business plan dari Universitas Prasetya Mulya. Dalam kegiatan ini, pengurus KSM diajarkan teori terkait perencanaan bisnis, pengelolaan tim, serta pemasaran. Setelah mendapatkan teori, kemudian KSM dibagi menjadi kelompok untuk membuat business canvas. Bisnis canvas yang telah dibuat kemudian dipresentasikan dan diberi penilaian oleh juri. Kemudian akan dipilih 6 besar untuk mendapatkan dana pendampingan dan stimulant.

Sebelum penentuan pemenang, sembari menunggu keputusan juri, acara dilanjutkan dengan penyampaian Best Practice. Pada kesempatan ini, Dinas PU Kabupaten Tabanan menjadi pembicara untuk pemerintah daerah yang lebih baik dalam pengelolaan sanimas. KSM Dharma Duta dan Indah Lestari menjadi perwakilan terpilih dari pihak KSM.

Setelah penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan peserta, acara kemudian ditutup oleh Bapak Rudy Azrul Arifin sebagai perwakilan dari Direktur Pengembangan PLP. "Sanimas adalah urusan kita bersama, bapak ibu adalah ujung tombak untuk bisa melaksanakan amanah dari Tuhan sebagai laskar sanitasi. Dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan resmi forum KSM Sanimas TA 2016 ditutup", merupakan kalimat penutup dari Bapak Rudy.

Daftar Pemenang Business Plan:

1. KSM Huyula, Gorontalo: Pemanfaatan sabut kelapa
2. KSM Sehati, Maros: Loket penjualan pulsa, HP, listrik, dan tiket pesawat. Ada sebuah aplikasi usahanya simpel tapi cukup dengan hp android.
3. KSM Waiputi, Ambon: Menjual BBM
4. KSM Titawaka, Maluku: Menjual keindahan laut, menawarkan jasa KSM seperti penyediaan angkutan laut
5. KSM Baluk, Talaud: Rumah IPAL dan Pasar Desa
6. KSM Padaidi, Samarinda: Kerajinan dari limbah plastik, wisata laut

Sanitasi Awards Kabupaten Temanggung 2016

Kabupaten Temanggung telah memiliki 30 Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat dari berbagai program. Dari total sarana tersebut setiap lokasi memiliki KSM Pengelola/KPP yang bertugas untuk mengoprasional dan mengelola sarana sanitasi yang telah terbangun diwilayah masing-masing. Tahun 2016 adalah kali Ke-III pelaksanaan Sanitasi Award, kegiatan ini kerjasama antara BAPPEDA, Dinas PU, BLH, DKK Kabupaten Temanggung dan AKSANSI. Dalam penilaian sanitasi award tahun ini tetap menggunakan 3 aspek utama yang menjadi tolak ukur keberlangsungan sarana sanitasi berbasis masyarakat. Ketiga aspek tersebut meliputi aspek teknis, kelembagaan, dan keuangan. Perbedaan Sanitasi Award tahun ini dengan kegiatan tahun lalu adalah adanya penilaian bagi operator. Harapanya dengan adanya penghargaan bagi operator diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat yang ada diwilayah masing-masing.

Sanitasi Award 2016 Kabupaten Temanggung dimulai pada 10 – 12 Oktober 2016, dengan tim penilai berasal dari perwakilan Sekretariat AKSANSI Pusat, Daerah, BAPPEDA, Dinas PU, BLH, dan DKK. Teknis pembagian tim penilai disesuaikan dengan komposisi yang mewakili setiap instansi dan bidang, ini bertujuan agar dalam proses penilaian lebih subjektif dan lebih transparan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Tim penilai dibagi menjadi 3, yang dalam sehari menengunjungi 3-5 lokasi karena jarak tempuh antara lokasi satu dengan lainya lumayan jauh dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai dilokasi.

Hal-hal umum yang ditemui pada saat proses penilaian adalah banyaknya sarana sanitasi yang kondisinya tidak berubah dari tahun lalu (2015) dan tahun ini (2016). Selain itu kurang dalam pemeliharaan dan perawatan serta tidak lengkapnya sarana fisik yang dibangun, seperti tidak adanya bak kontrol utama, bak perangkap lemak, dan tidak semua limbah masuk ke dalam IPAL (limbah toilet dan limbah mandi,cuci). Dari aspek sosial banyak ditemukan tidak jalanya kepengurusan KSM Pengelola sehingga tidak ada program rutin yang dilakukan untuk menunjang kegiatan perawatan dan pemeliharaan seperti iuran pengguna, pembersihan sekam, penggelontoran, perbaikan, dan pengurasan.

Diharapkan sanitasi award ini dapat membuat KSM pengelola SANIMAS menjadi lebih semangat. Dalam penilaian kali ini upaya dalam pemeliharan dimasukkan sebagai penentu kemenangan. Pemenang tidak hanya dari segi administratif dan fisik saja melainkan juga dari segi perubahan tiap tahunnya, jika keadaan tetap atau bahkan menurun dapat dikalahkan oleh yang mengalami peningkatan nilai terutama dari segi penigkatan upaya perawatan dan inovasi. Selain itu dengan adanya Kegiatan ini KSM Pengelola atau KPP termotivasi untuk menjaga, merawat, mengoperasikan, memelihara, serta mengembangkan sarana sanitasi yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya agar dapat berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Lubuklinggau Berbenah Kondisi Sanimas

Mengawal pembentukan AKSANSI Kota Lubuklinggau merupakan proses yang unik karena tidak hanya rekan-rekan KSM/KPP/BPS yang berkumpul namun juga BKM pelaksana program PNPM yang memiliki sarana sanitasi antusias untuk menjadi bagian dari AKSANSI Kota Lubulinggau. 6 bulan berselang sejak pembentukan kemudian melihat kesungguhan teman-teman pengurus Aksansi melakukan kunjungan lapangan melakukan premonitoring disela waktu kerja teman-teman.

Hasilnya bagaimana? Ini yang menarik, karena Pak Misno, Ketua AKSANSI Kota Lubuklinggau membuat visualisasi temuan hasil premonitoring dan memaparkan nya didepan anggota AKSANSI, Staff Ahli Walikota dan Kepada Kepala SKPD.

Tidak perlu lama reaksi dari Kepala-Kepala SKPD Kota Lubuklinggau pasca mendengarkan paparan Ketua AKSANSI Kota Lubuklinggau, semua menyepakati perlu ada nya langkah bersama agar keberlanjutan dan menjaga Aset SANIMAS yang bertujuan untuk membuat Kota Lubuklinggau lebih sehat.

Sebagai induk dari AKSANSI Kota Lubuklinggau, Dinas PU melihat potensi alokasi APBD yang bisa digunakan untuk mendukung program paska konstruksi ini dan berkomitmen untuk mengalokasi kan dana 100 juta untuk pertemuan, monitoring, pelatihan dan sanitasi award yang akan dilakukan setiap tahun. Semoga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau ini menjadi inspirator bagi Pemda pemda lain untuk mengikuti jejaknya.